



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**



**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN
2024**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5. Melaksanakan secara konsisten proses tata Kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan public melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan Upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya Pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam Upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan Upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan Masyarakat;

17. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

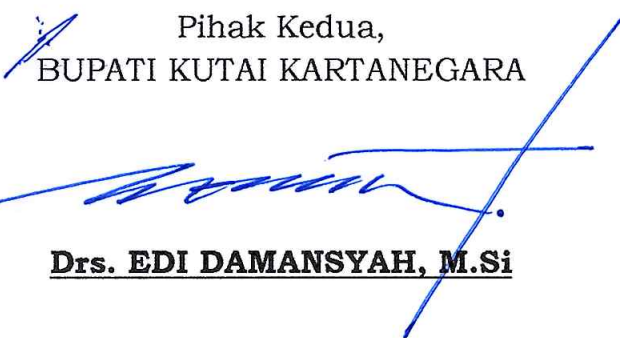
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 23 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai	71,50
2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,50
3	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan	Persen	10,37
4	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	Persen	100
5	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	4
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasarn Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun		
9	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
10	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
11	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambataakhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
14	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun		
16	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
17	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
18	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
19	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
20	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Pesen	100
21	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
22	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
23	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
24	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
25	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
26	Peningkatkan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
27	Tindak lanjut Pengaduan	Tindak Lanjut	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	SP4N Lapor	Pengaduan SP4N Lapor		
28	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
29	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
30	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
31	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
32	Pengarustamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarustamaan gender	Persen	100
33	Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rupiah	7,3T
34	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
35	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
36	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
37	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
38	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
39	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
40	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
41	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
42	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah	Persen	100

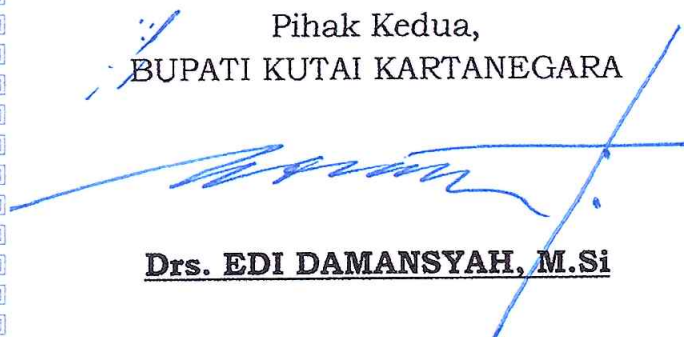
No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau		
43	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
44	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
45	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
46	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji” (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1
47	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK)	1

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	11.271.341.700	APBD-P
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	16.052.340.000	APBD-P
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	8.672.399.000	APBD-P
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000	APBD
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	15.094.099.333	APBD-P
6.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.100.000.000	APBD
7.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		52.590.180.033	

Kutai Kartanegara, 23 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5. Melaksanakan secara konsisten proses tata Kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan public melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan Upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya Pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam Upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan Upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan Masyarakat;

17. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 23 Nopember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

M. HATTA, SE. M.Si

Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

LUKMAN, S.Sos, M.Si

Pembina – IV/a
NIP. 19720516 200801 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,50
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasarn Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksannya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		anggaran berikutnya		
8	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
9	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
10	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
12	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
13	Peningkatkan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
14	Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
15	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
16	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
17	Pengarustamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarustamaan gender	Persen	100
18	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
19	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
20	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
21	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
22	Peningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
23	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
24	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
25	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
26	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	15.952.340.000	APBD-P
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000	APBD
3.	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	25.000.000	APBD
4.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		16.052.340.000	

Kutai Kartanegara, 30 September 2024

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA


LUKMAN, S.Sos, M.Si
Pembina – IV/a
NIP. 19720516 200801 1 016



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SYARIFAH ROSITAH,ST,MT

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5. Melaksanakan secara konsisten proses tata Kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan public melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan Upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya Pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam Upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan Upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan Masyarakat;

17. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

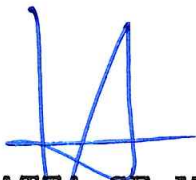
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 23 Nopember 2024

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS



M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA



HJ. SYARIFAH ROSITAH, ST, MT
Pembina – IV/a
NIP. 19721028 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan	Persen	10,37
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasarn Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya		
8	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
9	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
10	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
12	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
13	Peningkatkan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
14	Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
15	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
16	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
17	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
18	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
20	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
21	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		mempromosikan produk tembakau		
22	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
23	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
24	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	8.472.399.000	APBD-P
2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	200.000.000	APBD
3.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		8.772.399.000	

Kutai Kartanegara, 30 September 2024

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA


HJ. SYARIFAH ROSITAH, ST, MT
Pembina – IV/a
NIP. 19721028 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SUHARNINGSIH, SH, M.M

Jabatan : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5. Melaksanakan secara konsisten proses tata Kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan public melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan Upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya Pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam Upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan Upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan Masyarakat;

17. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

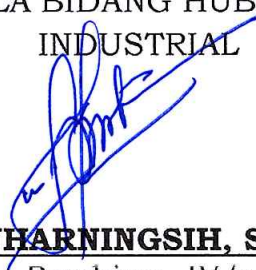
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 23 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL


Hj. SUHARNINGSIH, SH, M.M
Pembina– IV/a
NIP. 19690108 199403 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas	Persen	100
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasarn Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksannya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
5	Terlaksannya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Terlaksannya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
9	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
10	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
11	Peningkatkan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
12	Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
13	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
14	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
17	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
18	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
19	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
20	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
21	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
22	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1

**KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam Satu Daerah	462.000.000	APBD
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	10.809.341.700	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		11.271.341.700	

Kutai Kartanegara, 30 September 2024

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS

M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hj. SUHARNINGSIH, SH, M.M
Pembina- IV/a
NIP. 19690108 199403 2 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SAIFUL BAHRI, MH

Jabatan : KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE, M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5. Melaksanakan secara konsisten proses tata Kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan public melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan Upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya Pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam Upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan Upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan Masyarakat;

17. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 23 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS,


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI


Drs. SAIFUL BAHRI, MH
Pembina – IV/a
NIP. 19671006 20012 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	4
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasarn Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
5	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
6	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Pesen	100
8	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
9	Ketersediaan Dokumen	Ketersediaan dokumen	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Manajemen Risiko PD	manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan		
10	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
11	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
12	Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
13	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
14	Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rupiah	7,3T
15	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
16	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
17	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
18	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1.100.000.000	APBD-P
2.	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	300.000.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		1.400.000.000	

Kutai Kartanegara, 23 Nopember 2024

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS,


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI


Drs. SAIFUL BAHRI, MH
Pembina – IV/a
NIP. 19671006 20012 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIANI,S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5. Melaksanakan secara konsisten proses tata Kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan public melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan Upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam Upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
13. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 30 September 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS



M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN



MARIANI, S.Sos
Penata Tk. I – III/d
NIP. 19710724 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% Per tanggal 31 Maret setiap Tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per Tanggal 31 Maret Setiap Tahun	Persen	100
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
3	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
8	Penerapan Core Value ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
9	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
10	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
11	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
12	Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
13	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
14	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
15	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
16	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
17	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
18	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah laoran rekonsiliasi dan penyusunan laporan	Laporan	1

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	SKPD	Barang Milik Daerah		
19	Terlaksananya Administrasi umu Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	8
20	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1
21	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	JUmlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	4
22	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1
23	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Peloporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
24	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, Transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, Transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persen	100
25	Melaksanakan Percepatan Realisasi fisik dan keuangan	Persentase Percepatan Realisasi fisik dan keuangan	Persen	100
26	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Manajemen Resiko terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah	Persen	100
27	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Pesentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Persen	100
28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3Dn per Tanggal 25 setiap Tahun	Persen	40

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
29	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	1
30	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah aparatur yang yang di monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1
31	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	5
32	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	73
33	Terlaksananya Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang	40
34	Terlaksananya Grakan Etam Mengaji (GEMMA) di Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	82.200.000	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	959.700.000	APBD-P
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.601.000.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.280.522	APBD-P
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.041.931	APBD-P
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	385.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		4.504.222.453	

Kutai Kartanegara, 30 September 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN


MARIANI, S.Sos
Penata Tk. I – III/d
NIP. 19710724 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI NURHABIBI, SE, M.Si

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan secara konsisten proses tata Kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pemantauan dan pelaporan;

5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
6. Melaksanakan Upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
7. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
8. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 23 November 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA


RONI NURHABIBI, SE. M.Si
PEMBINA – IV/a
NIP. 19800330 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
2	Tercapainya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	Laporan	3
3	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70
4	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
8	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
12	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
13	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
14	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100
15	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji” (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	350.000.000	APBD-P
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	APBD-P
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.989.876.880	APBD-P
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		10.589.876.880	

Kutai Kartanegara, 23 November 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA


RONI NURHABIBI, SE, M.Si
PEMBINA – IV/a
NIP. 19800330 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ERNAWATI, SE

Jabatan : ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan secara konsisten proses tata Kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pemantauan dan pelaporan;
5. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

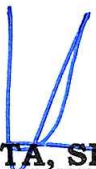
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 23 November 2024

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA


Hj. ERNAWATI, SE
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 19670717 199903 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menganalisa surat teguran Hukdis aparaturn sipil negara	Jumlah aparaturn sipil negara yang mendapatkan surat teguran Hukdis	Orang	1
2	Terlaksananya penugasan ASN (Plt, Plh, dan Nota Dinas)	Jumlah penugasan ASN	Dokumen	1
3	Tersusunya buku penjagaan KGB, Pensiun, Kenpa	Jumlah buku penjagaan KGB, Pensiun, Kenpa	Dokumen	1
4	Terlaksananya cuti PNS	Jumlah cuti PNS	Dokumen	1
5	Tersusunya daftar urutan kepangkatan dan daftar nominatif pegawai	Jumlah daftar urutan kepangkatan dan daftar nominatif pegawai yang Tersusun	Dokumen	1
6	Terwujudnya tingkat kepatuhan atas laporan kekayaan pejabat negara (LHKPN dan LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
7		Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
8	Terlaksananya Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
9	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun	Jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti ASN minimal 20 JP per tahun	Orang	1
10	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100

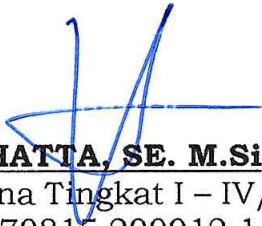
No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
11	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Pesen	100
12	Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisiensi, Inovatif, Akuntabel bersih dan Melayani	Ideks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
13	Tersusunya Anjab dan Abk Rencana Retdistribusi Pegawai atau Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (lima) Tahun dan Peta Jabatan ASN	Jumlah Anjab dan Abk Rencana Retdistribusi Pegawai atau Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (lima) Tahun dan Peta Jabatan ASN	Dokumen	1
14	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji” (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	APBD-P
2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	APBD-P
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	APBD-P
4.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	APBD-P
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155.000.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		385.000.000	

Kutai Kartanegara, 23 November 2024

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA


Hj. ERNAWATI, SE
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 19670717 199903 2 003

